BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Derliana fakultas ilmu sosial dan politik universitas komputer Indonesia dalam skripsinya yang berjudul Implementasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* Pada Ekspor Komoditas Udang Dan Tuna Dalam Sektor Perikanan Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan kerjasama ekonomi Jepang-Indonesia yang terbentuk kedalam suatu kerjasama yaitu IJEPA *(Indonesia japan economic partnership agreement)* menjelaskan bahwa Kerjasama Indonesia - Jepang bukanlah sesuatu yang baru bagi kedua belah negara. Sudah sejak lama Indonesia dan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Kesepakatan diantara kedua belah negara antara Indonesia dengan Jepang dilakukan karena keduanya telah memiliki hubungan ekonomi yang sangat lama. Alasan lainnya tentu karena masing-masing negara menganggap negara mitra adalah negara yang penting bagi ekonominya.

Terlebih lagi sejak dimulai dari tahun 1954, dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Bantuan ODA Jepang yang telah memberikan kontribusi besar melalui di bidang pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda Asia sejak Agustus 1997,

Jepang membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain. Begitu pula ketika gempa besar dan tsunami dari lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada Desember 2004, Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar 640 juta US Dollar. Selama ini, secara kumulatif, bantuan Jepang kepada Indonesia berjumlah 29,5 milyar US Dollar (total kumulatif sampai tahun 2006), oleh karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara donor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar.

Dengan latar belakang inilah, Jepang dan Indonesia telah memupuk persahabatan selama setengah abad, kedua negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal balik perkembangan ekonomi yang semakin global diwarnai dengan meningkatnya arus perdagangan baik di tingkat multilateral, regional, maupun bilateral. Blok perdagangan, pasar bersama, dan kesepakatan perdagangan bebas yang bertumpu pada sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dunia. Namun pada prinsipnya keterlibatan Indonesia di dalam berbagai kerjasama internasional tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus ditaati.

Sama halnya dengan industri otomotif Jepang sangat mendominasi Indonesia, Jepang merupakan negara pengekspor terbesar dalam hal manufacturing khusunya dibidang otomotif termasuk kendaraan beroda empat. Dan dalam penelitian ini diterangkan bahwa Jepang sebagai mitra dagang Indonesia dan dalam sektor perikanan IJEPA memberi kepastian akses pasar yang

lebih prefensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preference* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di ASEAN, sedangkan Brunei dan Vietnam menyusul. Kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing Indonesia sehingga keuntungan dari kerjasama optimal bagi Indonesia, dan keuntungan dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat termasuk usaha kecil menengah (UKM).

Selain itu bagi Jepang, Indonesia adalah pasar yang sangat penting. Meskipun telah mengalami penurunan dibanding dekade lalu, bagi Jepang Indonesia masih termasuk negara importir terbesar ke-6 (4.3%), setelah China, AS, Arab Saudi, Australia dan UEA. Didalam penelitian ini menjelaskan bahwa selain otomotif, Sektor perikanan juga salah satu ekspor terbesar yang terkait dengan kerjasama IJEPA. Kedudukan Jepang sebagai tujuan ekspor komoditas perikanan dari Indonesia memang tergolong sangat besar, biasanya yang diekspor ke Jepang adalah tuna yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Pada tahun 2008, jika dilihat dari nilai ekspornya, tuna menempati urutan kedua setelah udang. Secara nasional, total produksi tuna untuk ekspor sampai Oktober 2008 mencapai 130.056 ton dengan nilai sebesar 347,189 juta dollar AS (http://jabar .Tribun news.com/read /artikel/38761/Tahun-Lalu-Produksi-Peri kan an-Nasional-Capai-10 8-Juta-Ton).

Dan selain Penelitian diatas peneliti juga mengambil contoh penelitian yang dilakukan oleh oleh Nirwan Maulana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Universitas Komputer Indonesia yang berjudul Pengaruh Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal DiJepang Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Jepang, penelitian ini meneliti tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI keluar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengankenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI.

Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara Jepang dan Indonesia. Penelitian ini menyangkut tentang hubungan bilateral Indonesia Jepang sama halnya seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis tetapi dalam hal perekonomian bedanya.

Penelitian berikutnya yang peneliti ambil adalah penelitian dari Een Arin Pakaludin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Kepentingan Indonesia Dalam Mempertahankan IJEPA di Tengah Dampak Negatif yang dihadapinya dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana kerjasama ekonomi tersebut berpotensi untuk merugikan Indonesia karena dalam perjanjian ini Jepanglah yang merupakan pihak yang lebih dominan sehingga mampu mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Tidak hanya itu peneliti juga menjelaskan mengapa Indonesia masih terus mempertahankan perjanjian tersebut ditengah dampak negatif yang dihadapinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Een Arin Pakaludin pada dasarnya sama-sama melakukan penelitian tentang *Indonesia Japan Economuc Partnershi Agreement* (IJEPA) dengan penilitian, tetapi penelitian ini lebih membahas tentang kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang industri otomotif khususnya dalam nidang industry otomotif mobil Jepang yang ada di Indonesia

Ada beberapa teori yang salam dalam penelitian ini salah satunya teori hubungan internasional yang akan berkaitan dengan penelitian kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang, penelitian yang dilakukan Een Arin Pakaludin ini juga membahas tentang ketergantungan Indonesia terhadap Jepang dan kepetingan Indonesia untuk membangun kapasitasnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada mulanya berasal dari kontak dan interaksi diantara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman isu-isu Internasional mengalami perkembangan, negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu Internasional diluar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan

bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional, sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Pemikiran Hubungan Internasional dipengaruhi oleh subjek-subjek akademik lainnya seprti filsapat, sejarah, hukum, sosiologi, atau ekonomi. Pemikiran hubungan internasional juga menjawab perkembangan historis dan kontemporer dalam dunia nyata. Ada 3 perdebatan besar sejak hubungan internasional menjadi subjek akademik diakhir perang dunia pertam, dan sekarang kami berada diawal tahap keempat. Perdebatan besar yang pertama adalah antara liberalisme utopia dan realisme, yang kedua antara pendekatan tradisional dan berhavioralisme, yang ketiga antara neoralisme/neoliberalisme dan neo marxisme. Perdebatan keempat yang muncul adalah antara tradisi yang telah mapan dan alternatif-alternatif kaum pasca positivisme (jackson&sorensen,1998: 45-46).

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalambukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam transisi, hal itu berdampak pada situasi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi,

lingkungan hidup, dan lain sebaginya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional (Perwita dan Yani,2005: 7-8).

Dalam penelitian ini, hubungan internasional berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang disepakati melalui perjanjian kesepakatan *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Interaksi antar aktor ini yang kemudian membuat penulis menggunakan teori-teori hubungan internasional dalam menjelaskan penelitian.

2.2.2 Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty& Pfaltzgraff,1997: 418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian-serangkaian hubungan yang tidak didasarkan kepada kekerasan atau paksaan yang disahkan secara hukum seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau UNI EROPA. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu

organisasi internasinal dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalm suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty&Pfaltzgraff, 1997: 418-419).

Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagaisuatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalahmasalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tententu dan mengadakan pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak (Holsti, 1988:65).

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty&Pfaltzgraff,1997: 419).

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1) Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transpotasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusiyang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan

sendiri dalam sistem internasional anarkis ini (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 419-420).

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, seperti penelitian kesepakatan perjanjian antara Jepang dan Indonesia namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk intstitusioanl yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 420).

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yan disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembngunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan (Dougherty &

Pflatzgraff, 1997: 420).

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1) Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997:19).

Selain itu, masih ada faktor yang turut mempengaruhi kerjasama internasional, yaitu adanya perbedaan ideology, ekonomi, cultural, luas daerah, kepadatan penduduk, system pemerintahan dan lain-lain (Kartasasmita, 1987: 22-27).

Dalam penelitian ini, kerjasama internasional dipakai untuk melihat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang telah sejauh mana bekerjasama dalam sebuah perjanjian yang disepakati.

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Menurut T. May Rudi dalam bukunya Study Strategis : dalam transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin: "Kerjasama Bilateral adalah sebuah sebuah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan

Dalam proses pelaksanaan kerjasama bilateral Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan 3 motif:

1. Memelihara Kepentingan Nasional
2. Memelihara Perdamaian
3. Meningkatkan Kerjasama Ekonomi

Hubungan bilateral antar negara dapat meliputi sektor politik ekonomi, pertukaran duta atau diplomat hingga aktivitas seperti adanya kunjungan dalam misi kenegaraan. Konsep yang kemudian dikandung dalam interaksi ini adalah niatan untuk memperkokoh bentuk kerjasama antar negara demi tercapainya tujuan Nasional. Hubungan bilateral menurut Budiono Kusumahamidjojo Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptkan kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi.

Hubungan bilateral selalu berada tatanan konsep jika tidak dalam bentuk kerjasama pasti melalui paham konflik. Hal ini kemudian didasarkan bagaimana penerapan hubungan internasional dan cara untuk mempengaruhi rival negara

yang saling bekerjasama. Sementara, menurut Didi Krisna hubungan bilateral diartikan dalam kamus politik internasionalnya mengatakan, Kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara.

Hubungan bilateral dalam konteks keilmuan HI (Hubungan Internasional) merupakan keadaan yang dibangun oleh suatu negara kepada negara lain dengan menekankan adanya persuasif yang baik untuk membangun pencitraan sehingga terjalin sebuah kerjasama, dalam konteks hubungan bilateral ini penulis mengambil teori kerjasama bilateral karena Indonesia dan Jepang adalah masing-masing aktor yang mengatasnamakan sebagai wakil negara. Kerjasama Bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi diantara 2 negara. Dan kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral misalnya perjanjian politik ekonomi, pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antara negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral, yang melibatkan banyak negara dan unilateral, ketika semua negara berlaku semaunya sendiri.

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup Kedutaan Besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008: 85-87).

2.2.4 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi dan politik pada dasarnya sangat berkaitan satu sama lain, dimana ada ekonomi disitu pasti ada politik begitu juga sebaliknya dimana ada politik disitu ada politik. Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan ekonomi yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. Kalaborasi kedua ini yang dikawinkan yang kemudian melahirkan istilah ekonomi politik. Kaitan kedua istilah ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah dibidang moneter, fiskal dan komersial. Ketika kita berbicara ekonomi maka, istilah yang sering muncul atau kata-kata yang tidak lepas dari unsur PDB, komsumsi, investasi, fiskal, moneter, ekspor dan impor semua yang ditulis diatas adalah bahasa atau istilah yang akrab ditemukan dalam diskusi atau berbicara ekonomi itu sendiri, yang tentu berbeda dengan politik, istilah yang akan kita temukan adalah negara, idiologi, kelompok dan elit.

Didalam buku ekonomi politik internasional T May Rudi , menjelaskan bawha, GNP atau PNB merupakan penjumlahan keseluruhan produksi dan nilai perolehan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk dari usaha investasi diluar negeri. Sedangkan GDP atau PDB adalah keseluruhan produksi domestik(dalam negeri) satu negara, termasuk yang diproduksi oleh PMA (penanaman modal asing) yang hasil keuntungannya tidak sepenuhnya ikut dinikmati olerh penduduk. Oleh karena itu bagi negara kaya dan industi maju biasanya GNP (PNB) lebih basar nilainya dibandingkan GDP (PNB)

berhubungan cukup banyak investasinya diluar negri (perusahaan transnasional /multinasional). Sebaliknya bagi negara miskin atau negara berkembang,GDP bisa lebih besar dibandingkan GDPnya (Rudi, 2007: 41).

Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik, seolah-olah ekonomi politik itu sama dengan politik ekonomi. Bahkan cenderung dalam pendefinisian ekonomi politik diartikan secara kata perkata atau digunakan untuk menganalisa dua bidang kajian yaitu ekonomi dan politik. Padahal analisa ekonomi politik bukanlah analisa yang mendikotomikan antara ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Wilayah kajian ekonomi dan politik terpisah jauh sehingga sulit untuk menyatukan dua bidang tersebut. Menurut Erani perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Karena itu secara umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang di introdusir oleh pemerintah. Karena itu harus dipahami bahwa pendekatan ini meletakan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya bahwa instrument-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisa dengan mempergunakan setting politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi.

Dipelajari dalam ilmu ekonomi politik adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrument atau alat untuk mengatur

kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Proses ekonomi dengan pendekatan seting politik ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan politik maupun pendekatan ekonomi. Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik (konsep ekonomi politik. Melalui. http://politik.Kompasiana.com/2012/06/24/konsep-ekonomi-politik-472023.html diakses pada tangg al 24 juni 2012).

Menurut Robert Gilpin, dalam bukunya *The Political Economy of International Relations,* adalah sebagai berikut :

> "Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam system internasional. Pengkajian ekonomi-politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya masalah-masalah dalam isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi "(1987: 3).

Menurut Robert Jackson&Georg Sorensen dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional ada 3 pendekatan teoritis utama pada ekonomi politik internasional sepakat bahwa *globalisasi* ekonomi sedang berjalan. Tetapi mereka tidak sepakat mengenai muatan nyata proses tersebut *(interdependensi intensif atau sistem ekonomi global),* mereka juga tidak sepakat tentang akibat dari globalisasi ekonomi bagi negara. Kebanyakan kaum ekonomi liberal memiliki pandangan optimis atas globalisasi ekonomi. Salah satu contoh adalah ekonom terkenal amerika Milton Friedman yang mengamati fakta tersebut bahwa

sekarang “memungkinkan untuk menghasilkan suatu produk dimanapun, menggunakan sumber daya darimanapun, oleh perusahaan yang berlokasi dimanapun, untuk dijual dimanapun (Friedman, 1993: 35).

Isu-isu kekayaan dan kemiskinan yang diangkat oleh ekonomi politik internasional merupakan subtansi yang sangat penting dalam politik dunia. Fokus tradisional hubungan internasional adalah tentang perang dan damai, tetapi bahaya perang antarnegara, khususnya perang negasra-negara berkekuatan besar, nampaknya mengalami penurunan karena adanya ekonomi politik internasional (jackson&Sorensen, 1998:274).

Selain keterhubungan tiga sisi ekonomi politik, terdapat juga tiga isu ekonomi-politik internasional yang penting dan berkaitan dalam beberapa tahun belakangan ini:

1) Penyebaran dan intensifikasi semua jenis hubungan ekonomi di antara negara-negara
2) Tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam proses globalisasi ekonomi
3) Bagaimana kita seharusnya memandang relatif pentingnya politik dan ekonomi (Jackson&Sorensen, 2005:77).

Negara-negara pada saat ini mencoba membentuk dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dapat memelihara stabilitas perekonomian internasional dimana mereka semua semakin terhgantung. Hal itu biasanya menimbulkan sejumlah kebijakan ekonomi yang secara tepat dapat menghadapi pasar internasional, dengan kebijakan ekonomi negara lain, dengan

penanaman modal asing, dengan nilai tukar asing, dengan perdagangan internasional, dengan komunikasi dan transportasi internasional, dan dengan hubungan ekonomi internasional lainnya yang mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan nasional. Interdependensi ekonomi, yang berarti tingkatan tertinggi saling ketergantungan ekonomi dantara negara-negara, merupakan bentuk nyata sistem negara kontenporer.

2.2.5 Perdagangan Ekspor dan Impor

Dibanyak negara, perdagangan internasional menjkadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP *(Gross Domestic Product)* meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun *(lihat jalur sutra, amber road)*, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi sosial ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini, perdagangan internasionalpun turut mendorongindustrialisasi, kemajuan transfortasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinnasional.

Pada intinya perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir.

Perdagangan ekspor-impor berdasarkan definisi dari Undang-Undang Kepabeanan No.17 Tahun 2006 adalah suatu kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang dari dan ke negara berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Intinya ada pada pemasukan atau pengeluaran barang, baik didasari atas transaksi perdagangan atau bukan.

Dalam menjalankan usaha ekspor-impor, pelaku yang terlibat di dalamnya bisa berfungsi sebagai berikut:

1. Perantara antara penjual dan pembeli barang
2. Tenaga pemasaran di negara tujuan yang secara aktif melakukan teknik-teknik pemasaran
3. Pemilik barang, baik dengan membeli dari produsen maupun memproduksinya sendiri kemudian mencari pembelinya (Prasetya, 2009:161).

Dalam pelaksanaan perdagangan ekspor-impor terdapat beberapa dokumen yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Bukti Kontrak
2. Judul Untuk Barang
3. Informasi
4. Bea Cukai
5. Bukti Kepatuhan (Prasetya, 2009: 161-162).

Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Sedangkan impor sendiri pengertiannya adalah proses pembelian barang atau jasa

asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota.

Menurut Amir M.S, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan didalan negeri maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks, kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Manfaat perdagangan Internasional **:**

1) Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dinegara sendiri.

   Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi disetiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya: kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

2) Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

   Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi.

Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

3) Memperluas pasar dan menambah keuntungan.

   Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

4) Transfer teknologi modern.

   Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih baik.

Tujuan utama perdagangan internasional luar negri modern adalah menerangkan hukum keunggulan komparatif berdasarkan teori nilai yang dapat diterima dan mengabaikan sebagian asumsi-asumsi (Soelistyo, 1991:28).

Hukum yang mengatur Perdagangan Internasional Indonesia:

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain.

1) Undang-undang Nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 tentang perubahan

3) Undang-undang Nomer 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
4) Peraturan pemerintah Nomer 34 Tahun 1996 tentang Bea masuk Antidamping dan Bea Masuk Imbalan.
5) Keputusan mentri perindustrian dan perdagangan nomer 136/MPP /Kep/6/1996 tentang pembentukan komite anti dumping Indonesia
6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 172/MPP /Kep/10/ 2000 tentang Organisasi dan cara Kerja Tim Organisasi Antidumping,
7) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdanganan Nomer 472/MPP /MPP/Kep/10/2000 tentang Komite anti dumping Indonesia
8) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomer 428/MPP /kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite anti dumping Indonesia,
9) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomer 216/MPP /Kep/7/2001 tentang Perubahan keputusan Menteri perindustrian Nomer 261/MPP/kep/9/1996 tentang tata cara Persyaratan pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan barang Mengandung Subsidi.
10) Praturan Menteri perdagangan Repoblik Indonesia Nomer 37/M-Dag/per/9/2008 tentang surat keterangan Asala (*certificate of origin*) Terhadap Barang Impor yang dikenakan tindakan pengamanan (*safeguard*). (Perdagangan Indonesia. Melalui http://www.academia .edu/4615565/SEJARAH _PERDAGANGAN_INTERNASIONAL diakses pada 27 februari 2014).

Selain itu ada pula tujuan dari Hukum Perdagangan Internasional :

1) Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan prakti-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
2) Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia yang menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara.
3) Meningkatkan standar hidup umat manusia.
4) Meningkatkan lapangan tenaga kerja.
5) Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara.

Faktor penyebab Perdagangan Internasional :

1. Perbedaan dalam memproduksi barang Satu negara tidak dapat memproduksi barang tertentu.
2. Negara tidak dapat memproduksi barang sesuai dengan permintaan masyarakat Kadang kala masyarakat tidak menyukai barang yang diproduksi oleh negaranya sendiri. Misalnya saja masyarakat Indonesia, mereka tidak puas memakai barang produksi dalam negeri.
3. Produksi dalam negeri yang tidak seimbang dengan permintaan pasar. Persediaan barang dan permintaan pasar disetiap negara yang tidak seimbang (Liang, 1999: 67).

2.2.6 Perindustrian

Perindustrian adalah kegiatan proses produksi dalam industri, sedangkan pengertian industri itu sendiri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat.

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya kapas untuk inddustri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja.

Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang telpon, benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri margarine. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa

tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan. (http://geografi-geografi.blogspot.com-pengertian-industri-menurut-uu-no.html diakses pada bulan februari 2014)

Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Cara penggolongan atau pengklasifikasian industripun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

Dampak positif pembangunan Industri

1) Terbukanya lapangan kerja
2) Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat
3) Pendapatan/kesejahteraan masyarakat meningkat

4) Menghemat devisa negara

5) Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat

6) Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri

7) Penundaan usia nikah

Dampak negatif pembangunan Industri

1) Terjadi pencemaran lingkungan

2) Konsumerisme

3) Hilangnya kepribadian masyarakat

4) Terjadinya peralihan mata pencaharian

5) Terjadinya urbanisasi di kota-kota

6) Terjadinya permukiman kumuh di kota-kota

(pengertian perindustrian. Melalui http://geografi-geografi.blogspot.com/ 2010/11 pengertia-n-industri-menurut-uu-no.html diakses pada bulan januari 2014)

Dalam arti sempit, proses industrialisasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perubahan input menjadi satu atau beberapa output dengan menggunakan perkembangan teknologi dan juga institusi yang modern seperti pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk jadi yang siap dimanfaatkan, dan hasilnya dapat berupa barang maupun jasa. Industrialisasi yang sukses harus diikuti dengan terciptanya masyarakat industri.

Michael Z. Porter mengatakan, terdapat empat aspek utama pada lingkungan nasional suatu negara yang menjelaskan terjadinya pertumbuhan, inovasi, dan induktivitas, pada industri dan ekonomi nasionalnya, yaitu:

1. Faktor (input) kondisi, merupakan input dasar untuk menghadapi

kompetisi dalam industri yangn terdiri atas lahan, tenaga kerja, kapital, infrastruktur administratif atau komersial, SDM dan ilmu pengetahuan.

2. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan adalah kondisi tentang bagaimana pemerintah negara menciptakan, mengatur dan menyusun perusahaan-perusahaan agar sama banyaknya dengan persaingan domestik.
3. Kondisi *demand* atau permintaan merupakan bentuk *demand* dan *home market* untuk produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan industri. Hubungan dan dukungan industri-industri, yakni *supplier* didalam negeri dan hubungan lain industri-industri yang secara internasional sangat kompetitif (http://www.encyclopedia.thefreedictionary.comdiakses tanggal 2 Mei 2014).

Karena kemajuan dunia, salah satunya dalam ekonomi, membuat Indsutrialisasi yang telah berkembang kurang lebih tiga abad memiliki peranan yang sangat penting bagi dunia global, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Jepang yang meningkatkan industri otomotifnya dengan melakukan investasi dinegara lain misalkan Indonesia dalam kompetisi di dunia internasional karena kemampuan mereka untuk membaca permintaan pasar pada waktu-waktu tertentu.